

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan sistem anggaran berbasis kinerja di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah diantaranya UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 12 tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri No. 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Pada tahun 2004 pemerintah juga menerbitkan pengaturan yang lebih rinci tentang penganggaran melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Dalam peraturan tersebut diamanatkan bahwa penyusunan anggaran perlu dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja (*performance based budget*).

Di dalam Permendagri 21 tahun 2011 perubahan kedua atas Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah telah disebutkan tentang penyusunan RKA SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah). Dengan disusunnya RKA SKPD berarti telah terpenuhi kebutuhan tentang anggaran berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja menuntut adanya *output* yang optimal atau pengeluaran yang dialokasikan sehingga nantinya pada setiap pengeluaran harus berorientasi atau bersifat ekonomis, efektif dan efisien pada saat pelaksanaan dan pencapaian suatu hasil (*outcome*).

Menurut (Lande,2016) dalam hal ini anggaran berbasis kinerja memiliki pengaruh sebagai alat untuk mencapai tujuan instansi pemerintah daerah dan sebagai salah satu indikator peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah, begitu pula sebaliknya. Diharapkan dengan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja maka kinerja aparatur

pemerintah daerah meningkat, sehingga ada pengaruh yang besar antara anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.

Menurut Bastian (2006: 171) anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi yang berkaitan sangat erat dengan visi dan misi serta perencanaan strategis organisasi. Sistem penganggaran ini mengaitkan langsung antara *output* dengan *outcome* yang ingin dicapai yang disertai dengan penekanan terhadap efektifitas dan efisiensi anggaran yang dialokasikan (Sulistio, 2010). Anggaran berbasis kinerja di anggap penting, karena dengan adanya anggaran berbasis kinerja diharapkan dapat memperbaiki taraf hidup masyarakat, meningkatkan efektifitas pembangunan dan memperbaiki tata kelola keuangan dan pemerintahan yang lebih baik.

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatra Barat yang bertugas dan berwenang dalam mencapai keberhasilan pembangunan di bidang Pendidikan. Hal itu tercantum pada RPJMN pada agenda memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada sumber daya alam (SDA) yang tersedia, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang sudah tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026.

Untuk mencapai misi tersebut maka Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat telah menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja dalam pelaksanaan urusan keuangannya agar proses perencanaan dan penganggaran berjalan secara efektif dan efisien sehingga berdampak positif bagi masyarakat. Karena dengan adanya perencanaan dan penganggaran yang baik tentu akan mendukung proses pelaksanaan anggaran yang baik pula. Sebab pada dasarnya penganggaran dan perencanaan merupakan ilustrasi dari

apa yang akan dilakukan kedepannya. Sejak tahun 2021, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat telah menggunakan sistem digital/*e-budgeting* dalam penyusunan anggaran. Sistem digital/*e-budgeting* digunakan dengan tujuan agar penyusunan anggaran lebih mudah, cepat, dan hasil data lebih akurat. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana Dinas Pendidikan Sumatera Barat melaksanakan sistem anggaran berbasis kinerja dengan judul penelitian ***“Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dalam penelitian ini penulis ingin mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penerapan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana proses peralihan dari sistem penyusunan anggaran manual ke sistem penyusunan anggaran digital pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat?
3. Apakah terdapat kendala/masalah dalam menerapkan sistem penyusunan anggaran digital pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Magang

1.3.1 Tujuan Umum Magang

1. Sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar diploma III di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas.
2. Meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan pemahaman terhadap dunia kerja.
3. Sebagai sarana pengaplikasian ilmu yang telah didapatkan selama masa perkuliahan.

4. Sebagai salah satu usaha untuk mempersiapkan SDM yang berkualitas dalam hal menghadapi persaingan dimasa yang akan datang.

1.3.2 Tujuan Khusus Magang

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penerapan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses peralihan dari sistem penyusunan anggaran manual ke sistem penyusunan anggaran digital pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat kendala/masalah dalam menerapkan sistem penyusunan anggaran digital pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Magang

1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman tentang penerapan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

2. Bagi Pembaca

Untuk mengetahui seperti apa proses penerapan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

3. Bagi Instansi

Untuk membina hubungan kerjasama yang baik antara lembaga pendidikan dengan instansi pemerintah dan dapat membantu meringankan tugas-tugas pegawai di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

4. Bagi Universitas

Untuk meningkatkan hubungan kerjasama yang baik antara lembaga pendidikan dengan instansi pemerintah. Selain itu, universitas juga dapat meningkatkan kualitas alumninya lewat pengalaman magang serta dikenal dalam dunia kerja.

1.5 Metode Pengumpulan Data

1. Studi Lapangan

Pengumpulan data dilakukan penulis dengan observasi langsung dan pengamatan langsung ke subjek penelitian, meminta dan wawancara dengan petugas atau pejabat Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

2. Studi Kepustakaan

Penulis mencari, mengumpulkan dan mempelajari berbagai macam buku dan jurnal yang berkaitan dengan pembahasan laporan magang ini.

3. Internet

Mengumpulkan informasi dari berbagai macam website untuk membantu penulis mendapatkan informasi berkaitan dengan pembahasan laporan magang ini.

1.6 Tempat dan Waktu Magang

Dalam melaksanakan magang, penulis memilih Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat sebagai tempat pelaksanaan magang yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No.52, Jati Baru, Kec. Padang Tim., Kota Padang, Sumatera Barat. Pelaksanaan magang direncanakan berlangsung selama dua bulan atau 40 hari kerja.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan magang terdiri dari 5 BAB :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, metode pengumpulan data, tempat dan waktu penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan secara teoritis mengenai pengertian anggaran, tujuan dan manfaat anggaran, siklus anggaran, pengertian kinerja, indikator kinerja, pengertian anggaran berbasis kinerja, prinsip anggaran berbasis kinerja, tujuan anggaran berbasis kinerja, karakteristik anggaran berbasis kinerja, tahap penyusunan anggaran berbasis kinerja, dan elemen-elemen utama anggaran berbasis kinerja.

BAB III : GAMBARAN UMUM INSTANSI

Bab ini terdiri dari gambaran umum, sejarah, logo, visi misi, tugas dan fungsi, struktur organisasi dan tugas pokok dan fungsi masing – masing unit kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penulisan, memuat tentang tinjauan terhadap penerapan sistem anggaran berbasis kinerja pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang bermanfaat untuk dapat dipertimbangkan dalam rangka penerapan sistem anggaran berbasis kinerja pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

